



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. HARIS AR., AP. MH

Jabatan : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ERZALDI ROSMAN

Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Oktober 2018

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

PIHAK PERTAMA,
Kepala Biro Perekonomian Setda
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

ERZALDI ROSMAN

M. HARIS AR., AP. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19760620 199592 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pelaksanaan koordinasi administrasi wilayah	1. Jumlah tanah milik pemerintah provinsi yang telah bersertifikat. 2. Jumlah batas daerah antar kabupaten/kota yang terselesaikan 3. Jumlah unsur rupabumi (unsur buatan) yang terinventarisasi 4. Jumlah pilar batas daerah yang telah diinventarisasi dan dipelihara 5. Jumlah pilar batas daerah antar kabupaten/kota yang terpasang 6. Jumlah lahan yang telah disediakan oleh pemerintah provinsi	
2.	Meningkatnya jumlah koordinasi berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah	1. Jumlah LKPJ yang tersusun 2. Jumlah LPPD yang tersusun 3. Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dilakukan evaluasi kinerjanya 4. Jumlah urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah diselaraskan 5. Jumlah NSPK yang telah diterapkan 6. Jumlah peserta yang mengikuti workshop 7. Jumlah izin keluar negeri yang diterbitkan untuk KDH dan WKDH serta ketua dan anggota DPRD 8. Jumlah KDH dan WKDH yang diangkat dan diberhentikan	
3.	Meningkatnya jumlah pelaksanaan kerjasama daerah yang dikembangkan.	1. Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana 2. Jumlah kontribusi iuran yang diserahkan 3. Jumlah kontribusi iuran yang diserahkan dan rapat kerja yang diikuti 4. Jumlah kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang terlaksana 5. Jumlah potensi kerjasama yang sudah terdata 6. Persentase program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terlaksana	

Keterangan :

A.	Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	:	Rp.	625.821.975,00
B.	Program Pengembangan Otonomi Daerah	:	Rp.	1.448.352.830,00
C.	Program Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah	:	Rp.	1.388.819.000,00
	Jumlah Anggaran Keseluruhan	:	Rp.	3.462.993.805,00

Pangkalpinang, Oktober 2018

Pihak Kedua,
**GUBERNUR
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

H. ERZALDI ROSMAN

Pihak Pertama
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,

M. HARIS AR., AP. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19760620 199592 1 001